

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak masa reformasi yang terjadi mulai tahun 1998 silam, bangsa Indonesia sudah bergerak menuju masa-masa keterbukaan. Pada masa-masa ini, masyarakat negara Indonesia mengalami peningkatan terkait dengan kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban warga negara, serta lebih aktif dalam menyuarakan argumentasinya, termasuk tentang perbaikan sistem manajemen keuangan pada lembaga-lembaga pemerintah. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni tanggal 5 Januari 2022. Undang-undang HKPD diterbitkan untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut secara implisit akan memberikan cakupan wewenang yang lebih kompleks kepada lembaga pemerintah daerah, termasuk kebebasan terkait dengan peraturan mobilitas sumber anggaran serta penentuan kebijakan, dan target penggunaan anggaran yang diberikan.

Salah satu sub bagian dari lembaga pemerintahan daerah adalah kecamatan. Dalam tupoksinya, kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari lembaga pemerintah daerah yang ada di atasnya, yaitu Kota/Kabupaten yang menaunginya. Dalam hal menjalankan tugasnya, kecamatan diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan yang telah diberikan

untuk daerahnya. Proses manajemen keuangan yang terjadi di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki peranan yang sentral supaya rancangan dana yang telah diajukan dan ditetapkan dapat digunakan guna merealisasikan berbagai program kerja yang telah dicanangkan sebelumnya serta bertujuan untuk mengawasi apakah dana tersebut digunakan sebagai mestinya atau tidak yang sesuai dengan rancangan anggaran sebelumnya. Menurut Halim (2014), anggaran merupakan sebuah *output* dari sebuah tahap perencanaan yang meliputi daftar kegiatan yang berkaitan dengan sumber penerimaan dan pengeluaran dalam satuan uang pada kurun waktu tertentu. Guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan sistem serta mekanisme manajemen keuangan negara, kita terlebih dahulu harus mengetahui tentang tata cara penerapan sistem administrasi keuangan negara.

Setelah diimplementasikannya sistem akuntansi keuangan negara, diharapkan segala aktivitas yang dilakukan oleh sebuah lembaga dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sebuah sistem akuntansi yang terdapat pada lembaga pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dikarenakan mampu untuk mengukur serta mengendalikan seluruh aspek kegiatan yang memiliki keterkaitan dengan keuangan. Sistem manajemen keuangan negara akan berpengaruh langsung terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah pusat serta daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas mereka terhadap pengelolaan keuangan yang dibebankan kepada mereka sebelumnya (Sosial et al., 2010).

Pengelolaan keuangan daerah mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban keuangan yang selaras dengan kewenangannya. Pelaksanaan manajemen keuangan daerah haruslah dilakukan secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, dan akuntabel. Sebuah problematika yang timbul akibat dari manajemen keuangan daerah sejatinya memiliki hubungan yang erat dengan konsep pemahaman seseorang terhadap proses pengelolaan anggaran belanja yang kemudian dibagi menjadi dua, yakni APBN dan APBD. APBD sendiri sejatinya akan memuat suatu kebijakan yang dibebankan dan juga berisi tentang program kerja yang harus direalisasikan dalam satu periode kedepan. Selain itu didalam APBD juga harus memuat tentang rencana sumber penerimaan dana yang nantinya akan digunakan sebagai sebuah hal yang mampu menutup pengeluaran yang dilakukan karena menjalankan sebuah program kerja. Segala sumber penerimaan dan pengeluaran yang masih melibatkan suatu lembaga pemerintah harus dicantumkan kedalam APBD dan juga wajib mempunyai dasar hukum penganggaran. Permendagri terbaru yang mengatur tentang pengelolaan keuangan di Kantor Kecamatan adalah Permendagri Nomor 15 Tahun 2023. Peraturan ini berisi pedoman penyusunan APBD untuk tahun anggaran 2024. Permendagri ini bertujuan untuk memberikan panduan yang jelas dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien dalam mendukung pembangunan di daerah.

Lembaga kecamatan sebagai upaya perpanjangan tangan dari lembaga pemerintah kabupaten/kota diberikan kewenangan tersendiri untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan wilayahnya, salah satunya adalah

pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, kecamatan Purwokerto Selatan sebagai salah satu lembaga pemerintah dalam ruang lingkup kecamatan telah melakukan upaya pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana siklus terkait pendanaan serta perencanaan keuangan dalam periode tertentu. Selain itu, proses pengelolaan keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol segala anggaran yang digunakan untuk membiayai sebuah program kerja yang dilakukan agar terhindar dari segala hal yang berpotensi merugikan negara.

Besarnya suatu anggaran yang diterima oleh setiap desa yang terdapat di Indonesia secara tidak langsung akan memunculkan rasa kekhawatiran dari berbagai pihak. Hal itu dilandaskan kepada adanya peluang untuk melakukan kesalahan dalam hal manajemen keuangan desa yang meliputi tahap penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporannya. Dengan demikian, dalam upaya untuk mencegah hal tersebut terjadi diperlukannya transparansi serta partisipasi dari seluruh aspek masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengeksplorasi terkait dengan tata cara mengelola administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan. Oleh karena itu, penulis memilih judul "Prosedur Pengelolaan Administrasi Keuangan Pada Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan".

1.3 Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kecamatan

Purwokerto Selatan

1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.

- a. Memahami secara langsung prosedur pengelolaan administrasi keuangan di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.
 - b. Mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan ilmu pengelolaan administrasi keuangan pada pemerintah serta membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan kondisi nyata saat Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.
2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.
- a. Bagi Penulis
 - 1) Untuk melengkapi persyaratan dalam hal menyelesaikan studi program Diploma III (D-III) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
 - 2) Untuk memperoleh ilmu tambahan serta pengalaman baru yang ada di dunia kerja melalui Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.
 - 3) Guna menjadi studi perbandingan dengan sejumlah teori yang telah diperoleh di jenjang perguruan tinggi.
 - b. Bagi Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
 - 1) Menjadi acuan dan referensi untuk evaluasi dan peningkatan kurikulum.
 - 2) Membantu mempersiapkan lulusan yang siap bekerja dan kompeten di bidangnya, terutama lulusan Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

3) Menjadikan Tugas Akhir ini sebagai referensi dan bahan bacaan untuk menambah informasi.

c. Bagi Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.

1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja berupa program Praktik Kerja Lapangan di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.

2) Menjadi sarana untuk mempertimbangkan kriteria tenaga kerja yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang oleh instansi berdasarkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan oleh universitas.

3) Berkontribusi terhadap kelangsungan dan perkembangan Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.

4) Membantu instansi dalam hal mewujudkan visi serta misi yang ada di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.

1.4 Pembatasan Masalah

Menilik dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan diatas, diperlukan adanya batasan penyelesaian masalah agar peneliti kali ini dapat lebih terfokus dan terarah. Dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, maka tugas akhir ini hanya akan membahas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Kantor Kecamatan Purwokerto Selatan.

1.5 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

Tabel 1. 1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

No.	Keterangan	April	Mei	Juni
-----	------------	-------	-----	------

		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Tahap Persiapan													
1	Melakukan observasi ke tempat PKL	√											
2	Meminta surat pengantar dari fakultas		√										
3	Konfirmasi persetujuan dari tempat PKL		√										
4	Mengajukan judul Tugas Akhir								√				
Tahap Pelaksanaan													
5	Melaksanakan praktik kerja lapangan				√	√	√	√	√	√	√		
6	Melaksanakan wawancara kepada karyawan terkait pekerjaan				√	√	√	√	√	√	√		
7	Melakukan observasi dan praktik kerja lapangan				√	√	√	√	√	√	√		
Tahap Pelaporan													
8	Meminta beberapa dokumen untuk dianalisis dan dipelajari terkait pekerjaan						√	√	√	√			
9	Membuat laporan praktik kerja lapangan									√	√	√	√